**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor masing-masing yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan aspirasi masyarakat.

Penyusunan Renstra tersebut secara esensial (mendasar) memuat tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran untuk jangka waktu menengah yaitu 5 (lima) tahun, ditetapkan oleh SKPD yang selaras dengan arah dan kebijakan maupun program prioritas (*platform*) RPJMD serta RPJPD, selanjutnya Renstra yang telah disusun dan ditetapkan tersebut benar-benar menggambarkan penampilan perencanaan (*performance planning*) yang mudah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan SKPD, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD.

Renstra SKPD secara substansial berisikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, dan merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif dan indikatif, yang disusun melalui suatu alur atau proses yang sudah baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disusun oleh Kepala SKPD bersama seluruh pegawainya, hingga Renstra tersebut ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang memiliki tingkat legitimasi (keabsahan) yang tinggi untuk dapat diwujudkan secara efektif.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapusipda) sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan wajib yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) huruf q dan r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga harus dapat mempertanggungjawabkan kewenangannya tersebut secara akuntabel.

Sampai dengan saat ini, penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan dari tingkat nasional/pusat sampai dengan tingkat daerah secara umum sudah berjalan dan sudah ada keberhasilan yang telah dicapai. Namun keberhasilan yang telah dicapai tersebut, dirasakan belum optimal. Oleh karena itu diharapkan melalui Renstra Bapusipda dapat dirumuskan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan perpustakaan dan kearsipan secara sinkron dan sinergis serta lebih optimal antara pemerintah pusat yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan pemerintah daerah yaitu Arsip Daerah Provinsi, Arsip Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat dari aspek tata kelola/manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*), Renstra merupakan salah satu instrumen sangat penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan masih terdapat beberapa dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Seharusnya antara Renstra, RPJPD, RPJMD, RKPD terdapat keterkaitan dokumen maupun dalam rangka penyelenggaraanya terjadi secara simultan (serentak) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 yang ada saat ini, disusun untuk memenuhi keterkaitan dokumen dimaksud sebagai komitmen bersama bagi seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk mewujudkan perpustakaan yang mencerdaskan masyarakat dan kearsipan sebagai pilar akuntabilitas pemerintahan.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Bab XI pasal 35 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Jalur pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 );
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam, Film Cerita atau Dokumenter;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tatacara Pengalihan Dokumen ke Dalam Micro Film atau Media lainnya dengan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
23. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741 );
24. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014;
25. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014;
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;

aa. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;

bb. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025;

cc. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

dd. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa BaratTahun 2013 – 2018;

ee. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;

ff. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

gg. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

hh. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

hh. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 050/03/Bapp Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

* 1. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 selanjutnya disebut Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 merupakan dokumen resmi perencanaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta tahapan program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat bidang perpustakaan dan kearsipan.

Renstra Bapusipda Provinsi Tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Bapusipda Provinsi Jawa Barat.
2. Penentuan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Bapusipda Provinsi Jawa Barat.
3. Penentuan tolok ukur penilaian kinerja Bapusipda Provinsi Jawa Barat yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Terlaksananya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
2. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan di Jawa Barat.
4. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan yang sinegis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
   1. **Sistematika Penulisan**

Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Bapusipda Provinsi Jawa Barat; sumber daya yang dimiliki oleh Bapusipda Provinsi Jawa Barat, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat; telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi Bapusipda Provinsi Jawa Barat, tujuan dan sasaran jangka menengah Bapusipda Provinsi Jawa Barat, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Bapusipda Provinsi Jawa Barat.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Bapusipda Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Bapusipda Provinsi Jawa Barat yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Bapusipda Provinsi Jawa Barat.

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN**

**2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Bapusipda Provinsi Jawa Barat**

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yaitu urusan perpustakaan dan kearsipan.

Bapusipda Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan pada:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa barat.

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Badan mempunyai fungsi :

1 Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;

2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisiasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, telah diatur mengenai kelengkapan organisasi Bapusipda Provinsi Jawa Barat susunannya terdiri dari :

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan dan Program;
2. Subbagian keuangan;
3. Subbagian kepegawaian dan Umum

3. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;

4. Bidang Pemberdyaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca;

5. Bidang Layanan Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan;

6. Bidang Akuisisi dan Pelestarian;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan serta membina UPTB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan, perumusan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan perpustakaan dan kearsipan;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum, mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;

b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;

c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, mempunyai fungsi :

* 1. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis deposit dan pengolahan bahan perpustakaan;
  2. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan bidang deposit dan pengolahan bahan perpustakaan;
  3. Penyelenggaraan fasilitasi deposit dan pengolahan bahan perpustakaan;
  4. Penyelenggaraan fasilitasi otomasi lingkup deposit dan pengolahan bahan perpustakaan.

Bidang Pemberdayaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca, mempunyai fungsi :

* + - * 1. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca;
        2. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca;
        3. Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca;
        4. Penyelenggaraan otomasi lingkup pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca.

Bidang Layanan dan Otomasi Perpustakaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang layanan dan otomasi perpustakaan, mempunyai fungsi :

* + - * 1. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang layanan dan otomasi perpustakaan dan kearsipan;
        2. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan otomasi perpustakaan dan kearsipan;
        3. Penyelenggaraan fasilitasi layanan dan otomasi perpustakaan dan kearsipan

Bidang Pengelolaan Kearsipan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan kearsipan dinamis, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kearsipan dinamis;
2. Pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan kearsipan dinamis;
3. Penyelenggaraan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan kearsipan;

Bidang Akuisisi dan Pelestarian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan memfasilitasi pengelolaan kearsipan statis, mempunyai fungsi :

1. Pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan kearsipan statis;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan kearsipan statis;
3. Penyelenggaraan otomasi kearsipan statis;

Gambar Struktur dan Organisasi Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

**KEPALA BADAN**

**BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**BIDANG**

**AKUISISI DAN PELESTARIAN**

**BIDANG**

**LAYANAN OTOMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**SEKRETARIS**

**BIDANG**

**DEPOSIT BAHAN PERPUSTAKAAN**

**BIDANG PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYABACA**

**SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM**

**SUB BAGIAN**

**KEUANGAN**

**SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM**

**JAFUNG**

**ANGKA KREDIT DAN UMUM**

**JAFUNG**

**ANGKA KREDIT DAN UMUM**

**JAFUNG**

**ANGKA KREDIT DAN UMUM**

**JAFUNG**

**ANGKA KREDIT DAN UMUM**

**JAFUNG**

**ANGKA KREDIT DAN UMUM**

**Gambar 2** Struktur dan Organisasi Bapusipda

**2.2. Sumber Daya Bapusipda**

**2.2.1. Pegawai**

Jumlah Pegawai Bapusipda Provinsi Jawa Barat sampai dengan Desember 2014 sebanyak 148 orang, dengan rincian sesuai tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan per bulan Desember 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PENDIDIKAN** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1. | S.3 | 1 orang |  |
| 2. | S.2 | 16 orang |  |
| 3. | S.1. | 61 orang |  |
| 4. | D. III | 5 orang |  |
| 5. | SLTA | 60 orang |  |
| 6. | SLTP | 2 orang |  |
| 7. | SD | 3 orang |  |
|  | Jumlah | **148 orang** |  |

**Tabel 2.2**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Golongan per bulan Desember 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **GOLONGAN** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1. | IV | 15 orang |  |
| 2. | III | 70 orang |  |
| 3. | II. | 55 orang |  |
| 4. | I | 2 orang |  |
|  | Jumlah | **148 orang** |  |

**Tabel 2.3**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin per bulan Desember 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELAMIN** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1. | Laki-laki | 77 orang |  |
| 2. | Perempuan | 78 orang |  |
|  | Jumlah | **148 orang** |  |

**Tabel 2.4**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan per bulan Desember 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
|  | Struktural | 10 |  |
|  | Arsiparis | 17 |  |
|  | Pustakawan | 23 |  |
|  | Fungsional Umum | 75 |  |
|  | Fungsional Umum tertentu | 29 |  |
|  | Jumlah | **148 orang** |  |

**2.2.2. Asset/Modal**

Asset/modal yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Desember 2014 sesuai tabel dibawah ini :

**Tabel 2.5**

Asset/modal yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan

| **NO** | **ASSET YANG TERSEDIA** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **TANAH** |  |  |
|  | Sebidang Tanah | 12.500 m2 | Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Kota Bandung |
|  | **PERALATAN DAN MESIN** |  |  |
|  | Alat Angkut Roda 4 (empat) | 22 unit |  |
|  | Alat Angkut Roda 2 (dua) | 16 unit |  |
|  | Alat Kantor Rumah Tangga | 11.950 unit |  |
|  | Alat Studio dan Komunikasi | 129 unit |  |
|  | Alat laboratorium | 4 unit |  |
|  |  |  |  |
|  | **GEDUNG DAN BANGUNAN** |  |  |
|  | Gedung Arsip | 10.000 m2 | Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 |
|  | Gedung Perpustakaan Umum | 5.380 m2 | Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 |
|  | **ASSET TETAP LAINNYA** |  |  |
|  | Buku | 91.746 judul (402.794 eksamplar) |  |
|  | Lukisan | 1 unit |  |
|  | Compact Disk |  |  |
|  | Koleksi KCKR Perpustakaan Deposit | 979 judul  (22.684 eksamplar) |  |

**2.2.3. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana untuk Bidang Perpustakaan sampai dengan Desember 2014 sesuai tabel dibawah ini :

**Tabel 2.6**

Sarana dan Prasarana Bidang Perpustakaan

| **NO.** | **NAMA SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Tanah dan Gedung Perpustakaan Umum Daerah (Ged. Perpustakaan Bertaraf Internasional)** | 4000 m2 | Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 |
|  | Akesibilitas Kaum Difable | 10,37 m2 | Akses Pintu Masuk Utama GPBI |
|  | Area Theatre Terbuka Perpustakaan | 13,35 m2 | Lahan Timur GPBI |
|  | Area Prasasti Kabupaten/Kota se Jawa Barat | 361,80 m2 | Lahan Timur GPBI |
|  | Lobby | 204,29 m2 | Lantai 1 GPBI |
|  | Hall | 242,13 m2 | Lantai 1 GPBI |
|  | Coffee Shop | 123,59 m2 | Lantai 1 GPBI |
|  | Ruang Baca Anak | 277,78 m2 | Lantai 1 GPBI |
|  | Galeri Kabupaten/Kota | 361,91 m2 | Lantai 1 GPBI |
|  | Ruang Simpan Buku Perpustakaan Keliling | 71,00 m2 | Lantai 1 GPBI |
|  | Ruang Baca Remaja | 286,95 m2 | Lantai 2 GPBI |
|  | Ruang Baca Dewasa | 159,26 m2 | Lantai 2 GPBI |
|  | Ruang Diskusi | 49,49 m2 | Lantai 2 GPBI |
|  | Ruang Kepala Bidang | 42,19 m2 | Lantai 2 GPBI |
|  | Ruang Referensi | 264,09 m2 | Lantai 2 GPBI |
|  | Ruang Baca Koran/Majalah/Terbitan Berkala | 147,22 m2 | Lantai 2 GPBI |
|  | Ruang Audio Visual | 36,57 m2 | Lantai 2 GPBI |
|  | Aula | 536,72 m2 | Lantai 3 GPBI |
|  | Ruang Rapat | 99,22 m2 | Lantai 3 GPBI |
|  | Ruang Tunggu VIP | 67,90 m2 | Lantai 3 GPBI |
|  | Ruang Ganti | 111,38 m2 | Lantai 3 GPBI |
|  | Lahan Parkir | 382 m2 | Lahan Selatan GPBI |
| **B** | **Peralatan** |  |  |
|  | Buku tamu on-line | 1 unit | Layanan Perpustakaan GPBI |
|  | Aplikasi sistem katalog on-line/OPAC (On-line Publik Access Catalogue) | 1 unit | Layanan Perpustakaan GPBI |
|  | Wi-Fi Area | 1 unit | Area GPBI |
|  | Escalator | 3 unit | GPBI |
|  | Lift | 2 unit | GPBI |
|  | Genset | 1 unit | Lahan Barat GPBI |
| **C** | **Peralatan/Kendaraan** |  |  |
| 1 | Server | 5 unit |  |
| 2 | Komputer | 100 unit |  |
| 3 | Laptop | 15 unit |  |
| 4 | Infocus | 7 unit |  |
| 5 | Mobil Perpustakaan Keliling | 4 unit |  |

**Tabel 2.7.**

Sarana dan Prasarana Bidang Kearsipan

| **NO** | **NAMA SARANA PRASARANA**  **KEARSIPAN** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Tanah dan Gedung Depo Arsip Pemerintah Provinsi Jawa Barat** | 10.000 m2 | Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 |
|  | Ruang Preservasi Arsip | 155,88 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
|  | Ruang Layanan Pengguna Arsip | 69,120 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
|  | Ruang Perpustakaan khusus Bapusipda | 51,840 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
|  | Ruang Theatre Bapusipda | 51,840 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
|  | Ruang Records Centre Bapusipda | 32,940 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
|  | Ruang Data Centre | 77,760 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
|  | Ruang Sekretariat Asosiasi Arsiparis Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Barat | 31,05 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
| **B** | **Depo/Ruang Simpan Arsip** |  |  |
| **√** | Depo Arsip Dinamis |  |  |
|  | Arsip Inaktif Keuangan Rutin dan Kepegawaian | 1393,92 m2 | Lantai V dan VII Ged. Arsip |
|  | Arsip Inaktif Keuangan Proyek dan DIBALE | 696,960 m2 | Lantai VI Ged. Arsip |
|  | Arsip Vital Asset | 35,640 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
|  | Arsip Vital Non Asset | 696,960 m2 | Lantai IV Ged. Arsip |
| √ | Depo Arsip Statis |  |  |
|  | Arsip Statis Konvensional | 696,960 m2 | Lantai III Ged. Arsip |
|  | Arsip Statis Media Baru | 51,840 m2 | Lantai IV Ged. Arsip |
| **C** | **Peralatan/Kendaraan** |  |  |
|  | Rak Besi | 2836 buah | Lantai III s.d VII Ged. Arsip |
|  | Roll O’pack | 54 unit | Lantai III s.d V Ged. Arsip |
|  | Komputer | 74 unit |  |
|  | Aplikasi SIMKA | 3 aplikasi | Lantai I Ged. Arsip |
|  | Meja Sortir Arsip | 2 unit | Lantai VII Ged. Arsip |
|  | Filling Cabinnet | 61 unit |  |
|  | Lemari Arsip Peta/Gambar | 9 buah | Lantai IV Ged. Arsip Sayap A |
|  | Lemari Kayu Arsip Media Baru | 29 unit | Lantai IV Ged.Arsip |
|  | Lemari Besi Arsip Vital | 2 unit | Lantai I Ged. Arsip |
|  | Dehumadifier | 1 unit |  |
|  | Thermohygrograft | 1 unit |  |
|  | Pintu Besi Ruang Arsip Vital | 1 set | Lantai I Ged. Arsip |
|  | Filing Kartu | 7 buah |  |
|  | Sistem Proteksi Arsip (*indoor*) FM 200 | 2 unit | Lantai III dan IV Ged. Arsip sayap A |
|  | Alat Pemadam Api Tabung | 14 tabung |  |
|  | Mesin Absen Digital | 5 Unit | Lantai I Ged. Arsip dan Lantai I GPBI |
|  | Microfilm (*processor* dan *reader*) | 2 unit |  |
|  | Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip | 1 unit |  |
|  | CCTV | 1 set (48 titik) |  |

**2.2.4. Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan dan Volume Arsip**

**Tabel 2.8**

Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS BAHAN PERPUSTAKAAN** | **TAHUN** | **JUMLAH** | |
| **JUDUL** | **EKSEMPLAR** |
| 1 | Buku Pengadaan Bapusipda | 2014 | 71.102 | 348.774 |
| 2 | Literatur Jawa Barat | 3.147 | 12.627 |
| 3 | KCKR | 979 | 22.684 |
| 4 | Koleksi Langka | 789 | 1.840 |
| 5 | Buku SIF | 3.000 | 3.000 |
| 6 | Buku Wakaf | 6.214 | 7.354 |
| 7 | Koleksi e-book | 5.900 | 5.900 |
| 8 | Koleksi Digital | 615 | 615 |
|  | Jumlah |  | 91.780 | 402.794 |

**Tabel 2.9**

Volume Arsip

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS ARSIP** | **JUMLAH** | **TAHUN** |
| 1 | Arsip dinami inaktif retensi 10 tahun lebih | 48.729 boks | 2014 |
| 2 | Arsip statis Konvensional |  |  |
|  | Kertas/konvensional | 14.360 boks | 2014 |
|  | Kertas/Konvensional | 2.828 jilid |
|  | Kartografi/peta | 2.056 lembar |
|  | Arsitektural | 56 lembar |
| 3 | Arsip statis media baru |  |  |
|  | Foto (+) | 150.015 lembar | 2014 |
|  | Foto (-) | 138.977 eksposuer |
|  | Film reel | 157 reel |
|  | Kaset video VHS | 43 buah |
|  | Kaset video betamax | 364 buah |
|  | Kaset rekaman suara | 185 buah |

**2.2.5. Anggaran**

Kondisi Anggaran Periode Tahun 2008 – 2013 sesuai dengan tabel dibawah ini :

**Tabel 2.10**

Kondisi Anggaran Periode Tahun 2008 – 2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TAHUN | BTL | BL | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2008 | 9.213.193.498 | 13.499.322.036 | 22.712.515.534 |
|  | 2009 | 10.532.419.329 | 14.842.574.000 | 25.374.993.329 |
|  | 2010 | 16.011.322.155 | 22.502.246.617 | 38.513.568.772 |
| 1. 2 | 2011 | 16.468.763.250 | 35.867.205.108 | 52.335.968.358 |
|  | 2012 | 16.234.568.250 | 45.637.604.135 | 61.872.172.385 |
|  | 2013 | 16.711.173.960 | 41.521.680.000 | 58.232.853.960 |
|  | Jumlah Total | **85.171.440.442** | **173.870.631.896** | **259.042.072.338** |

**2.3. Kinerja Pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat**

Kinerja dalam arti unjuk kerja atau performance, berkaitan dengan hasil akhir atau *outcome* yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu (Yeremias T. Keban, 2004). Sedangkan pelayanan dalam arti pemenuhan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa secara efektif dan memuaskan, maka kinerja pelayanan suatu organisasi pasti mencerminkan tingkat pencapaian dari tugas pokok dan fungsi suatu organisasi.

**BAB III**

**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat**

Perpustakaan dan kearsipan telah ditetapkan dalam rumpun urusan yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, namun demikian perpustakaan dan kearsipan merupakan 2 (dua) urusan pemerintahan wajib yang memiliki karakteristik permasalahan yang tidak sama. Oleh karena itu identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan perpustakaan dan kearsipan harus dilihat berdasarkan karakteristik masing-masing.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **TUGAS POKOK** | **FUNGSI** |
| Merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan serta membina UPTB | 1. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan; 2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan perpustakaan dan kearsipan; 3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi |

Pelaksanaan urusan perpustakaan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain :

* + - 1. Pemberdayaan Kegemaran Membaca (PKM) masih rendah;
      2. Jumlah tenaga fungsional pustakawan masih kurang;
      3. Jumlah bahan perpustakaan belum memenuhi Standar Perpustakaan Nasional;
      4. persentase serah simpan karya cetak dan karya rekam masih rendah;
      5. Akses layanan perpustakaan belum efektif.

Pelaksanaan urusan kearsipan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain :

* + - 1. Pemahaman aparatur pemerintah terhadap arsip masih rendah;
      2. Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih kurang;
      3. Persentase pengelolaan arsip secara baku kearsipan masih rendah;
      4. Penyelamatan arsip bernilai sejarah kurang intensif;
      5. Perlindungan dan pengamanan terhadap arsip vital belum efektif;

**Tabel 3.1**.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Wajib Bapusipda Provinsi Jawa Barat

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan OPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNAL | EKSTERNAL |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Urusan Perpustakaan | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan umum daerah sebesar 0.50% | IKK 2014 | prioritas pengadaan buku | Peran serta penerbit | Pemenuhan kebutuhan pemustaka sangat terbatas |
|  | Pengunjung perpustakaan sebesar 19.91% | IKK 2014 | Integrasi layanan perpustakaan | Kerjasama layanan dengan stakeholder | Kecepatan layanan perpustakaan berkurang |
| Urusan Kearsipan | Pengelolaan arsip secara baku sebesar 10.34% | IKK 2014 | Komitmen pimpinan pencipta arsip | Regulasi pengawasan kearsipan | Kondisi pengelolaan arsip belum baik |
|  | Peningkatan SDM pengelola kearsipan sebesar 4 kegiatan | IKK 2014 | Minat menjadi jafung arsiparis | Regulasi pembinaan jafung arsiparis | Kinenrja kearsipan masih rendah |

* 1. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Bapusipda Provinsi Jawa Barat**

Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program harus terdapat hubungan hirarkis secara utuh, sehingga terjadi keselarasan antara kebijakan dan implementasinya yang akan melahirkan kinerja prima.

Kinerja prima berarti unjuk kerja atau performance, berkaitan dengan hasil akhir atau outcome yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu dengan capaian hasil yang sangat memuaskan dalam kaitan layanan pemenuhan kebutuhan pemustaka dan pengguna arsip.

Oleh karena itu dalam rangka telaahan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program seperti yang digambarkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bapusipda

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visi : Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk semua | | | | |
| No | Misi dan Program  KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat | Faktor | |
| Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Misi 1 Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing | Minat baca masyarakat masih rendah | Koleksi bahan perpustakaan belum lengkap sesuai SNP | Komitmen stakeholder untuk koleksi perpustakaan lengkap |
|  | **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** |
| 2 | Misi 3 Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik | Pengelolaan arsip di pencipta arsip belum efektif | Pembinaan dan pengawasan kearsipan belum efektif | Penguatan regulasi kearsipan |
|  | **Program Pengembangan Kearsipan** |

* 1. **Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

**Tabel 3.3.**

Permasalahan Pelayanan Bapusipda berdasarkan Sasaran Renstra K/L

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Bapusipda | Sebagai Faktor | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penghambat  (-) | Pendorong  (+) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat | Koleksi bahan perpustakaan belum lengkap sesuai SNP | Tingkat pemenuhan koleksi belum prioritas | Komitmen stakeholder untuk koleksi perpustakaan lengkap |
| 2 | Meningkatkan intensitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis TIK | Layanan perpustakan yang integrated belum efektif | Sumber daya layanan perpustakaan masih rendah | Keinginan yang kuat untuk layanan perpustakan terintegrasi |
| 3 | Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat | Pembinaan lembaga/SDM perpustakaan belum intensif | Jumlah SDM perpustakaan masih kurang | Penguatan regulasi SDM perpustakaan |
| 4 | Melestarikan dan memberdayakan semua karya tulis, karya cetak dan karya rekam hasil karya intelektual | Kesadaran penerbit masih rendah | Sharing informasi belum efektif | Penguatan regulasi KCKR |
| 5 | Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis TIK | Pengelolaan arsip berbasis efektif | Sarpras pengelolaan arsip berbasis TIK belum standar | Komitmen stakeholder untuk pengelolaan arsip berbasis TIK |
| 6 | Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan | Pembinaan kearsipan belum intensif | Jumlah SDM perpustakaan masih kurang | Penguatan regulasi SDM kearsipan |
| 7 | Mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara | Penyelamatan arsip belum efektif | Kerjasama penyelamatan arsip belum intensif | Peningkatan sosialisasi penyelamatan arsip |

* 1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

* 1. **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

Selanjutnya menjelaskan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

**Tabel 3.4**

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KRITERIA | BOBOT (%) |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota | 10 |
| 2. | Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD | 10 |
| 3. | Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik | 30 |
| 4. | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah | 10 |
| 5. | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 10 |
| 6. | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan | 30 |
|  | Bobot Total | 100 |

\*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

1. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka
2. Dengan mengisi tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

Tabel Skala Kriteria

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | ISU STRATEGIS | NILAI SKALA KRITERIA KE- | | | | | | RATA-RATA SKOR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca masyarakat | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 90% |
| 2. | Pengelolaan arsip sesuai standar baku kearsipan | 10 | 10 | 25 | 20 | 10 | 20 | 85% |
| 3. | Integrasi layanan perpustakaan dan kearsipan | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 70% |
| 4. | Pelestarian bahan perpustakaan dan arsip secara intensif | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 65% |
| 5. | Meningkatkan kuantitas dan kualitas jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 75% |
| 6. | Perlindungan dan pengamanan arsip vital/arsip asset dengan efektif | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60% |

1. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap skor isu strategis, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | ISU-ISU STRATEGIS | TOTAL SKOR | RATA-RATA SKOR |
|  |  | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca masyarakat | 90% | 15% |
| 2. | Pengelolaan arsip sesuai standar baku kearsipan | 85% | 14.16% |
| 3. | Meningkatkan kuantitas dan kualitas jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis | 75% | 12.5% |
| 4. | Integrasi layanan perpustakaan dan kearsipan | 70% | 11.66% |
| 5. | Pelestarian bahan perpustakaan dan arsip secara intensif | 65% | 10.83% |
| 6. | Perlindungan dan pengamanan arsip vital/arsip asset dengan efektif | 60% | 10% |

**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. **VISI DAN MISI**

Perumusan visi dan misi jangka menengah Bapusipda Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang penuh makna (*meaningfull*) serta penuh arti (*artikulatif*) akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

1. **Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, maka visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:

***PERPUSTAKAAN MENCERDASKAN MASYARAKAT DAN KEARSIPAN PILAR AKUNTABILITAS***

Makna visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa kondisi yang akan dicapai adalah terwujudnya lembaga perpustakaan dan kearsipan yang mampu berperan strategis sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai OPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan urusan wajib bidang perpustakaan dan kearsipan. Peran strategis perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mencerdaskan masyarakat, sedangkan peran startegis arsip sebagai bahan bukti otentik pertanggungjawaban bagi akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah serta memori kolektif suatu daerah. Terhadap bahan-bahan perpustakaan maupun arsip tersebut dituntut kinerja pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat agar mampu menghadirkan perpustakaan sebagai wahana belajar yang dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan, serta arsip sebagai bahan pertanggungjawaban yang akuntabel dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah, arsip sebagai memori kolektif daerah sebagai sumber utama dalam menuliskan nilai – nilai sejarah.

* + - 1. Bahwa Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan kebijakan daerah bersifat spesifik yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan dituntut untuk mampu menjamin ketersediaan dan keamanan serta kemudahan dalam penggunaan bahan perpustakaan dan arsip melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sampai dengan terwujudnya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan secara efektif dan efisien, dan hasilnya harus dinikmati oleh semua pemustaka dan semua pengguna arsip secara memuaskan.
      2. Bahwa bahan perpustakaan dan arsip yang berada dibawah kewenangan Bapusipda Provinsi Jawa Barat diharapkan bermanfaat secara nyata di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat khusunya, *stakeholder* bidang perpustakaan dan kearsipan, maupun semua masyarakat pengguna bahan perpustakaan dan arsip, dalam kerangka mendukung terwujudnya visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”

1. **Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

**Mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat;**

**Mewujudkan arsip sebagai bahan bukti otentik penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sumber informasi publik;**

**Mengembangkan dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip untuk kepentingan IPTEK;**

**Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK;**

**Meningkatkan pembinaan perpustakaan dan kearsipan.**

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi Bapusipda Provinsi Jawa Barat tersebut, maka untuk mencapai atau mewujudkannya diperlukan rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disertai dengan indikator-indikatornya secara spesifik, relevan, terukur dan logis.

**4.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam menyusun dan menetapkan tujuan (*goal setting*) diperlukan beberapa kriteria sebagai berikut :

* 1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.
  2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
  3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
  4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, relevan, dan rasional untuk dapat dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun.

Adapun kriteria sasaran terdiri dari:

* 1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
  2. Untuk mencapai tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
  3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah;
  4. Memenuhi kriteria ***Specific, Measureable, Achievable, Recources, Time***(**SMART**)

Sesuai dengan Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 yang telah ditetapkan, harus diikuti dengan penetapan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kearsipan dalam kurun 5 (lima) sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Misi 1** | **:** | **Mewujudkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat** | |
|  |  |  |  |
| Tujuan | : | Meningkatkan kecerdasan masyarakat | |
|  |  |  |  |
| Sasaran | : | 1. | Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan; |
|  |  | 2. | Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat; |
|  |  | 3. | Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan membaca. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Misi 2** | **:** | **Mewujudkan Arsip Sebagai Bahan Bukti Otentik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sumber Informasi Publik** | |
|  |  |  |  |
| Tujuan | : | Meningkatkan tata kelola sesuai standar baku kearsipan | |
|  |  |  |  |
| Sasaran | : | 1. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip setiap pencipta arsip; |
|  |  | 2. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemeliharaan arsip; |
|  |  | 3. | Meningkatnya kapasitas penyimpanan arsip sesuai standar baku kearsipan. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Misi 3** | **:** | **Mengembangkan dan Melestarikan Bahan Perpustakaan dan Arsip Untuk Kepentingan IPTEK** | |
|  |  |  |  |
| Tujuan | : | Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan perpustakaan dan arsip secara permanen | |
|  |  |  |  |
| Sasaran | : | 1.  2.  3. | Meningkatnya pengembangan khasanah bahan perpustakaan dan arsip  Meningkatnya preservasi arsip;  Meningkatnya pemanfaatan dan pendayagunaan bahan perpustakaan dan arsip |
|  |  |  |  |
| **Misi 4** | **:** | **Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Berbasis TIK** | |
|  |  |  |  |
| Tujuan | : | Memudahkan akses layanan perpustakaan dan kearsipan | |
|  |  |  |  |
| Sasaran | : | 1. | Meningkatnya layanan perpustakaan dan kearsipan; |
|  |  | 2. | Meningkatnya layanan perpustakaan dan kearsipan sesuai standar pelayanan prima; |
|  |  |  |  |
| **Misi 5** | **:** | **Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan** | |
|  |  |  |  |
| Tujuan | : | Mengembangkan kelembagaan dan SDM perpustakaan dan kearsipan | |
|  |  |  |  |
| Sasaran | : | 1. | Meningkatkan pembinaan lembaga teknis perpustakaan dan lembaga kearsipan; |
|  |  | 2. | Meningkatnya kompetensi SDM perpustakaan dan kearsipan; |
|  |  | 3. | Meningkatnya kerjasama antara para pemangku kepentingan perpustakaan dan kearsipan; |
|  |  |  |  |

**4.3. Analisis Lingkungan Strategis**

Analisis lingkungan strategis yang digunakan adalah *Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O), Threats (T)* atau yang dikenal dengan sebutan **SWOT *Analysis.*** Berikut ini adalah uraian mengenai hasil analisis lingkungan berdasarkan analisis SWOT yang meliputi beberapa sumber daya utama sebagai berikut :

**a. Kelembagaan.**

Secara normatif lembaga Bapusipda Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan pada :

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, keberadaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat memiliki aspek legal formal yang sangat konkrit dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

1. **Tanah dan Gedung Kantor**

Tanah dan gedung kantor sebagai salah satu asset yang dimiliki oleh Bapusipda Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

Tanah seluas 12.000 m2 dan Gedung Arsip seluas 10.000 m2, terletak di Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4, Kota Bandung;

Gedung Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat seluas 5.380 m2, terletak di Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4, Kota Bandung.

Keberadaan asset Bapusipda Provinsi Jawa Barat tersebut, memperlihatkan kedudukan yang kuat dan strategis dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

1. **Peraturan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan.**

Bapusipda Provinsi Jawa Barat telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu :

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2002, tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jadual Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang Jadual Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Bapusipda Provinsi Jawa Barat diharapkan akan mampu melaksanakan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya secara optimal.

1. **Sumber Daya Manusia Perpustakan dan Kearsipan**

Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan dan kearsipan yang berada di Bapusipda Provinsi Jawa barat terdiri dari :

* + - 1. Pejabat Struktural sebanyak 10 orang
      2. Pejabat Fungsional Pustakawan sebanyak 19 orang
      3. Pejabat Fungsional Arsiparis sebanyak 12 orang
      4. Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan sebanyak 39 orang
      5. Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan sebanyak 37 orang

Meskipun secara kuantitas dan kualitas masih terbatas, keberadaan SDM perpustakaan dan kearsipan khususnya bagi pustakawan maupun arsiparis harus menjadi motor penggerak utama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya tersebut yaitu

1) Internal

* + - * + Pejabat struktural Bapusipda Provinsi Jawa Barat 10 orang, terdiri dari 1 orang Kepala (eselon IIa), 5 orang Kepala Bidang (eselon IIIa), 1 orang Sekretaris Badan (eselon IIIa) dan 3 orang Kepala Sub Bagian dibawah Sekretariat eselon (IVa).
        + Pejabat fungsional pustakawan 19 orang dan arsiparis 12 orang, masih belum mencukupi.
        + Jumlah pegawai Bapusipda Provinsi Jawa Barat sampai bulan Desember 2013 sebanyak 154 orang**.**
        + Asset Bapusipda Provinsi Jawa Barat dalam berbagai kelompok/katagori dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
        + Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapusipda Provinsi Jawa Barat sudah definitif.
        + Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (APBD) dan dana dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
        + Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja yang baku bagi pelaksanaan tugas pemerintahan dan atau berbasis pada standar ISO sesuai dengan kebutuhan.

2) Eksternal

Beberapa pihak yang berkepentingan (*steakholder*) secara eksternal yaitu :

* Jumlah sasaran tupoksi sebanyak 58 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta ditambah 26 lembaga perpustakaan dan lembaga kearsipan di Kabupaten/Kota.
* Jumlah sasaran tupoksi sebanyak 6 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat.
* Jumlah Penerbit Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Barat sebanyak 376 lembaga.
* Jumlah penerbit pemerintah di Jawa Barat sebanyak 260 lembaga.
* Jumlah penerbit swasta di Jawa Barat sebanyak 199 lembaga.
* Jumlah pengusaha rekaman di Jawa Barat sebanyak 14 lembaga.
* Jumlah perpustakaan umum sebanyak 8.091 lembaga.
* Jumlah perpustakaan khusus sebanyak 4.031 lembaga.
* Jumlah perpustakaan sekolah/madrasah sebanyak 52.323 lembaga.
* Jumlah perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 386 lembaga.
* Jumlah *records centre* sebanyak 58 unit.
* Jumlah lembaga kearsipan di Kabupaten/Kota sebanyak 26 lembaga.
* Jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 397.062 orang/tahun.
* Jumlah pengunjung kearsipan sebanyak 42 orang/tahun.
* Perhatian, apresiasi para pimpinan instansi.
* Etos kerja, budaya kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan hasil analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman di dalam pengembanganperpustakaan dan kearsipan kearsipan di Jawa Barat.

**1) Analisis Lingkungan Internal ( ALI)**

**a. Kekuatan *( Strenght )***

Berbagai kekuatan yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat antara lain :

* 1. Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis yang memiliki kekuatan dan kedudukan hukum yang cukup memadai sebagai Badan yang mempunyai kebijakan yang mengarah pada pencapaian tujuan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  2. Adanya peraturan perundang-undangan dan regulasi perpustakaan dan kearsipan (spesialis) yang sudah ada sebagai dasar hukum, legalitas formal penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
  3. Tersedianya SDM yang meskipun masih terbatas secara kualitas dan kuantitas di bidang perpustakaan dan kearsipan tetapi peran dan atau kewenangan yang diberikan cukup besar, untuk menggerakan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
  4. Adanya reformasi birokrasi pemerintahan yang kuat untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga perpustakaan dan kearsipan, serta mengembangkan, mengelola dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip;
  5. Adanya komitmen dan dukungan yang tinggi dari Gubernur dan Wakil Gubernur;
  6. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana;
  7. Tingginya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan bahan perpustakaan secara kualitas maupun kuantitas;
  8. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan dan kearsipan yang dapat dimanfaatkan dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian dan informasi menuju masyarakat cerdas.

1. **Kelemahan (*Weaknesses*)**

Beberapa kelemahan yang terdapat pada Bapusipda Provinsi Jawa Barat :

* 1. Sumber daya terutama SDM perpustakaan dan kearsipan masih kurang;
  2. Lokasi Bapusipda Provinsi Jawa Barat kurang strategis;
  3. Pembinaan perpustakaan dan kearsipan belum intensif;
  4. Koordinasi belum efektif;
  5. Kaderisasi jabatan fungsional belum jelas.
  6. **Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

1. **Peluang (*Opportunities*)**
   1. Permintaan tenaga pengajar, narasumber, tenaga assesment dari sekolah tentang perpustakaan dan kearsipan
   2. Pencapain indeks membaca yang tinggi;
   3. Pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk produktifitas perpustakaan dan kearsipan;
   4. Permintaan instansi pemerintah untuk lulusan perpustakaan dan kearsipan meningkat signifikan;
   5. Adanya jurusan perpustakaan dan kearsipan pada akademi, perguruan tinggi;
   6. Adanya perusahaan swasta yang usahanya bergerak di bidang jasa kearsipan;
   7. Penerbitan karya cetak, karya rekam perpustakaan yang terus berkembang;
   8. Wujud arsip dan perpustakaan sebagai simbol kemajuan peradaban suatu negara atau bangsa;
   9. Perkembangan arsip sebagai alat bukti yang otentik;
   10. Peran arsip dan perpustakaan era otonomi daerah semakin penting.
2. **Ancaman (*Threats*)**
   1. Bencana alam dan non alam;
   2. Kaderisasi tenaga profesional pustakawan dan arsiparis berjalan stagnan;
   3. Rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap arti pentingnya arsip;
   4. Adanya fenomena pemusnahan arsip oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan maksud-maksud tertentu dan untuk kepentingan menghilangkan alat bukti;
   5. Pembinaan jabatan fungsiona pustakawan dan arsiparis yang belum efektif;
   6. Penempatan pegawai di perpustakaan dan kearsipan pada umumnya kurang berkualitas dan atau tidak sesuai dengan kebutuhan;
   7. Lembaga perpustakaan dan kearsipan dimarginalkan;
   8. Tidak adanya formasi pegawai untuk jabatan pustakawan maupun arsiprais.

**4.4. Strategi dan Kebijakan**

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2013, bidang Perpustakaan termasuk dalam penjabaran misi pertama yaitu Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**, dengan sasaran :

* 1. Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
  2. Memenuhi koleksi bahan perpustakaan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat;
  3. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan perpustakaan;
  4. Meningkatnya preservasi koleksi bahan perpustakaan;
  5. Meningkatnya pemanfaatan bahan perpustakaan;
  6. Meningkatnya layanan perpustakaan;
  7. Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM perpustakaan;
  8. Meningkatnya kerjasama perpustakaan.

Sedangkan bidang kearsipan termasuk dalam misi ketiga yaitu Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik, melalui **Program Pengembangan Kearsipan**, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip setiap pencipta arsip;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemeliharaan arsip;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyimpanan arsip berdasarkan standar baku kearsipan;
4. Meningkatnya preservasi arsip;
5. Meningkatnya pemanfaatan arsip;
6. Meningkatnya layanan kearsipan;
7. Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM kearsipan;
8. Meningkatnya kerjasama kearsipan.

Berkaitan dengan strategi dan kebijakan yang harus diimplementasikan melalui program serta sasaran yang telah ditetapkan oleh Bapusipda Provinsi Jawa Barat, yang dilanjutkan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal (ANALISIS *SWOT*). Maka rincian strategi dan kebijakan Bapusipda Provinsi Jawa Barat periode tahun 2013 – 2018 atau untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah :

* + - 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan strategi dan kebijakannya sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

| **N0** | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **STRATEGI** | **KEBIJAKAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan | Persentase kunjungan pemustaka | Intensifikasi promosi dan publikasi perpustakaan | 1. Kerjasama dengan stakeholder 2. Peningkatan sarana pendukung yang representative 3. Peningkatan kuantitastas dan kualitas koleksi |
| 2 | Memenuhi koleksi bahan perpustakaan sesuai standard an kebutuhan masyarakat | Persentase koleksi bahan perpustakaan | Terdatanya jumlah koleksi bahan perpustakaan | 1. Kerjasama dengan penerbit 2. Adanya survey kebutuhan 3. Kualitas dan kuantitas koleksi 4. Meningkatkan pengelolaan KCKR 5. Meningkatkan kesadaran para wajib serah simpan KCKR |
| 3 | Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan perpustakaan | Persentase kegiatan PKM | Identifikasi dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan perpustakaan | 1. Menggerakkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan melaui lingkungan keluarga satuan pendidikan dan masyarakat 2. Bahan perpustakaan yang bervariatif 3. Perpustakaan yang representative 4. Promosi yang terus menerus dan berkesinambungan 5. Penyuluhan minat baca |
| 4 | Meningkatnya preservasi koleksi bahan perpustakaan | Persentase bahan perpustakaan yang dipreservasi | Identifikasi preservasi koleksi bahan perpustakaan | 1. Pelestarian dan perbaikan bahan perpustakaan 2. Alih media/alih bentuk 3. Preservasi bahan perpustakaan |
| 5 | Meningkatnya pemanfaatan bahan perpustakaan | Persentase bahan perpustakaan yang dimanfaatkan | Intensifikasi pemanfaatan dan pendayagunaan bahan perpustakaan | 1. Bahan perpustakaan yang current 2. Penyebaran bahan perpustakaan yang merata 3. Mengacu pada standar nasional perpustakaan 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan 5. Peningkatan sarana pendukung yang representative 6. Adanya aksesibilitasi aplikasi perpustakaan |
| 6 | Meningkatnya layanan perpustakaan | Persentase layanan perpustakaan | Intensifikasi kualitas dan kuantitas layanan | 1. Jumlah jangkauan layanan 2. Peningkatan SDM 3. Bahan Perpustakaan yang current 4. Mengacu standar nasional perpustakaan 5. Inovasi layanan perpustakaan 6. Promosi dan publikasi kegiatan layanan |
| 7 | Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM perpustakaan | Persentase pembinaan perpustakaan | Identifikasi data pembinaan lembaga perpustakaan dan SDM perpustakaan | 1. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan 2. Peningkatan lembaga perpustakaan sesuai standar perpustakaan |
| 8 | Meningkatnya kerjasama perpustakaan | Persentase kerjasama perpustakaan | Elaborasi dengan lembaga dan komunitas | 1. Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, komunitas dan perorangan untuk membangun budaya baca 2. Membangun sinergi dan memperkuat kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, komunitas dan perorangan untuk membangun budaya baca |

2. Program Pengembangan Kearsipan strategi dan kebijakannya sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

| **No** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip setiap pencipta arsip | Persentase pencipta arsip sesuai standar baku kearsipan | Identifikasi lembaga, SDM, sistem dan sarana prasarana kearsipan | Membangun kesepahaman mengenai penyelenggaraan kearsipan dengan para pencipta arsip |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemeliharaan arsip | Persentase kegiatan pemeliharaan arsip | Identifikasi jenis arsip/klasifikasi arsip | Menerapkan prosedur pemberkasan dan alih media (digitalisasi) arsip |
| 3. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyimpanan arsip berdasarkan standar baku kearsipan | Persentase kapasitas penyimpanan arsip | Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan | Implementasi kebijakan dan pemenuhan sarana prasarana kearsipan yang sesuai standar |
| 4. | Meningkatnya preservasi arsip | Persentase arsip yang dipreservasi | Identifikasi fisik arsip statis | Aktivasi kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip statis |
| 5. | Meningkatnya pemanfaatan arsip | Persentase arsip yang dimanfaatkan | Identifikasi jalan masuk (akses) arsip | Penerapan prosedur sistem keamanan dan klasifikasi arsip (SKKA) |
| 6. | Meningkatnya layanan kearsipan | Persentase layanan kearsipan | Identifikasi pengunjung layanan informasi kearsipan | Melaksanakan publikasi dan sosialisasi kearsipan |
| 7. | Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM kearsipan | Persentase pembinaan kearsipan | Identifikasi metode pembinaan kearsipan | Penerapan pembinaan kearsipan melalui berbagai kegiatan seperti supervise, diklat, bintek, sosialisasi, diseminasi |
| 8. | Meningkatnya kerjasama kearsipan | Persentase kerjasama kearsipan | Identifikasi institusi yang berkaitan/berhubungan dengan lembaga kearsipan | Menyusun materi dan pola perjanjian kerjasama tentang kearsipan dengan institusi terkait |

Dalam rangka mengimplementasikan strategi kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tersebut di atas, **target kinerja** yang ingin dicapai periode 2013 - 2018 sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3**

Target Kinerja

| **No** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Program dan Kegiatan** | **Target** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | | **2015** | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** |
| Misi 1 : Mewujudkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakan | persentase kunjungan pemustaka | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | 468.981 orang |  | 513.731 orang |  | 539416 orang |  |  |  |  |  |
| 2. | memenuhi koleksi perpustakaan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat | persentase koleksi bahan perpustakaan | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | 34540 eks |  | 9.321 eks | 347.500.000 | 18100 eks | 1.810.000.000 | 18.100 eks | 2.300.000.000 |  |  |
| 3. | meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan membaca | persentase kegiatan membaca | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | 4 keg |  | 4 keg | 518.816.250 | 4 keg | 972.000.000 |  |  |  |  |
| Misi 2 : Menyelamatkan Arsip Sebagai Bahan Bukti Otentik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sumber Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | meningkatnya kualitas dan kuantitias pengelolaan arsip setiap pencipta arsip | persentase pencipta arsip sesuai standar baku kearsipan | Program Pengembangan Kearsipan | 40.000 box |  | 45.800 box |  | 51.600 box |  | 63.200 box |  | 69.000 box |  |
| 2. | meningkatnya kualitas dan kuantitas pemeliharaan arsip | persentase kegiatan pemeliharaan arsip | Program Pengembangan Kearsipan |  |  | 5.700 lbr |  | 25.700 lbr |  | 45.700 lbr |  | 65.700 lbr |  |
| 3. | memenuhi penyimpanan arsip sesuai standar baku kearsipan | persentase kapasitas penyimpanan arsip | Program Pengembangan Kearsipan |  |  |  |  | 10 unit |  | 20 unit |  | 35 unit |  |
| Misi 3 : Mengembangkan dan Melestarikan Bahan Perpustakaan dan Arsip untuk Kepentingan IPTEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | meningkatnya preservasi bahan perpustakaan | persentase bahan perpustakaan yang dipreservasi | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan |  |  |  |  | 84.496 eks |  |  |  |  |  |
| 100 eks |  | 75 eks |  | 100 eks |  | 100 eks |  |  |  |
| 2. | meningkatnya preservasi arsip | persentase arsip yang dipreservasi | Program Pengembangan Kearsipan | 229 lbr |  | 200 lbr |  | 288 lbr |  | 288 lbr |  |  |  |
| 11.785 lbr |  | 604 lbr |  | 3000 lbr |  | 3.450 lbr |  | 3.450 lbr |  |
| 3. | meningkatnya pemanfaatan bahan perpustakaan | persentase bahan persentase yang dimanfaatkan | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | 402.794 eks |  | 412.115 eks |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | meningkatnya pemanfaatan arsip | persentase arsip yang dimanfaatkan | Program Pengembangan Kearsipan | 25 khas |  | 23 khas |  | 21 khas |  | 17 khas |  |  |  |
| Misi 4 : Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Berbasis TIK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | meningkatnya layanan terbuka perpustakaan | Persentase layanan terbuka perpustakaan | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| meningkatnya layanan terbuka kearsipan | persentase layanan terbuka kearsipan | Program Pengembangan Kearsipan | 6.000 org | 157.980.000 | 6.000 org | 197.320.000 | 6.000 org | 132.700.000 | 6.000 org | 867.000.000 | 5835 org |  |
| 2. | meningkatnya layanan tertentu perpustakaan | persentase layanan tertentu perpustakaan | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | 294.000 org |  | 331.200 org |  | 691.200 org |  | 1.224.000 org |  | 1488000 org |  |
| meningkatnya layanan tertentu kearsipan | persentase layanan tertentu kearsipan | Program Pengembangan Kearsipan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | memenuhi layanan perpustakaan sesuai ISO | persentase audit layanan perpustakaan | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | 1 kali |  | 1 kali |  | 1 kali |  |  |  |  |  |
| memenuhi layanan kearsipan sesuai ISO | persentase layanan kearsipan | Program Pengembangan Kearsipan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | meningkatkan pembinaan lembaga perpustakaan | persentase pembinaan lembaga perpustakaan | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan |  |  | 1.825 unit |  | 590 unit |  |  |  |  |  |
| meningkatkan pembinaan lembaga kearsipan | persentase pembinaan lembaga kearsipan | Program Pengembangan Kearsipan |  |  | 27 LKD & 58 OPD |  | 27 LKD & 58 OPD |  | 27 LKD & 58 OPD |  | 27 LKD & 58 OPD |  |
| 2. | memenuhi sertifkasi SDM perpustakaan | persentase pembinaan SDM perpustakaan | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan |  |  | 1966 org | 449.092.500 | 1.277 org | 990.000 |  |  |  |  |
| memenuhi sertifikasi SDM kearsipan | persentase pembinaan SDM kearsipan | Program Pengembangan Kearsipan | 152 0rg |  | 152 0rg |  | 152 0rg |  | 152 0rg |  | 152 0rg |  |
| 3. | meningkatnya kerjasama antar stakeholder perpustakaan | persentase naskah kerjasama perpustakaan | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | 25.558 eks |  | 4.946 eks |  | 4001 eks |  | 2.875 eks |  | 3.000 eks |  |
| meningkatnya kerjasama antar stakeholder kearsipan | persentase naskah kerjasama kearsipan | Program Pengembangan Kearsipan | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Untuk menjabarkan Kebijakan, maka ditetapkan **Program-Program sebagai berikut** :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;
2. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
9. Program Pengembangan Kearsipan;
10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

1. **Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang direncanakan untuk periode tahun 2013 - 2018 seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018**

Tabel 5.1

| **TUJUAN** | | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **KODE** | **PROGRAM DAN KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)** | **DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2013** | **TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | | | | | | **UNIT KERJA SKPD PENANG**  **GUNG JAWAB** | **LOKASI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | | **2015** | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD** | |
| **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** |
|  | |  |  |  |  |  |  | **dalam jutaan Rupiah** | | | | | | | | | | | |  |  |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Misi 1 : Mewujudkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Meningkatkan kecerdasan masyarakat** | 1 | meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakan | persentase kunjungan pemustaka | 81 | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | jumlah pengunjung perpustakaan |  | 468.981 orang |  | 513.731 orang |  | 539416 orang |  |  |  |  |  |  |  | Bidang LOPK | Jawa Barat |
|  | 2 | memenuhi koleksi perpustakaan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat | persentase koleksi bahan perpustakaan | 81 | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | Jumlah bahan perpustakaan |  | 34540 eks |  | 9.321 eks | 347.500.000 | 18100 eks | 1.810.000.000 | 18.100 eks | 2.300.000.000 |  |  |  |  | Bidang DPBP | Bandung |
|  | 3 | meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan membaca | persentase kegiatan membaca | 81 | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | jumlah kegiatan pemasyarakatan perpustakan |  | 4 keg |  | 4 keg | 518.816.250 | 4 keg | 972.000.000 |  |  |  |  |  |  | Bidang P3BB | Jawa Barat |
| **Misi 2 : Menyelamatkan Arsip Sebagai Bahan Bukti Otentik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sumber Informasi Publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Meningkatkan tata kelola arsip sesuai standar baku kearsipan** | 1 | meningkatnya kualitas dan kuantitias pengelolaan arsip setiap pencipta arsip | persentase pencipta arsip sesuai standar baku kearsipan | 80 | Program Pengembangan Kearsipan | jumlah arsip otentik |  | 40.000 box |  | 45.800 box |  | 51.600 box |  | 63.200 box |  | 69.000 box |  |  |  | Bidang PK | Bandung |
|  | 2 | meningkatnya kualitas dan kuantitas pemeliharaan arsip | persentase kegiatan pemeliharaan arsip | 80 | Program Pengembangan Kearsipan | jumlah kegiatan pemeliharaan arsip |  |  |  | 5.700 lbr |  | 25.700 lbr |  | 45.700 lbr |  | 65.700 lbr |  |  |  | Bidang PK |
|  | 3 | memenuhi penyimpanan arsip sesuai standar baku kearsipan | persentase kapasitas penyimpanan arsip | 80 | Program Pengembangan Kearsipan | jumlah data centre kearsipan |  |  |  |  |  | 10 unit |  | 20 unit |  | 35 unit |  |  |  | Bidang PK |
| **Misi 3 : Mengembangkan dan Melestarikan Bahan Perpustakaan dan Arsip untuk Kepentingan IPTEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan perpustakaan dan arsip secara permanen** | 1 | meningkatnya preservasi bahan perpustakaan | persentase bahan perpustakaan yang dipreservasi | 81 | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | jumlah bahan perpustakaan yang diperbaiki |  |  |  |  |  | 84.496 eks |  |  |  |  |  |  |  | Bidang DPBP | Bandung |
| jumlah digitalisasi bahan perpustakaan |  | 100 eks |  | 75 eks |  | 100 eks |  | 100 eks |  |  |  |  |  | Bidang DPBP |
|  |  | meningkatnya preservasi arsip | persentase arsip yang dipreservasi | 80 | Program Pengembangan Kearsipan | jumlah arsip yang diperbaiki |  | 229 lbr |  | 200 lbr |  | 288 lbr |  | 288 lbr |  |  |  |  |  | Bidang Akulesta |
| jumlah digitalisasi arsip |  | 11.785 lbr |  | 604 lbr |  | 3000 lbr |  | 3.450 lbr |  | 3.450 lbr |  |  |  | Bidang Akulesta |
|  | 2 | meningkatnya pemanfaatan bahan perpustakaan | persentase bahan perpustakaan yang dimanfaatkan | 81 | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | jumlah bahan perpustakaan yang siap dimanfaatkan |  | 402.794 eks |  | 412.115 eks |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bidang DPBP |
|  |  | meningkatnya pemanfaatan arsip | persentase arsip yang dimanfaatkan | 80 | Program Pengembangan Kearsipan | jumlah arsip yang siap dimanfaatkan |  | 25 khas |  | 23 khas |  | 21 khas |  | 17 khas |  |  |  |  |  | Bidang Akulesta |
| **Misi 4 : Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Berbasis TIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Memudahkan akses layanan perpustakaan dan kearsipan** | 1 | meningkatnya layanan terbuka perpustakaan | persentase layanan terbuka perpustakaan | 81 | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | jumlah pengunjung perpustakaan untuk layanan terbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bidang LOPK | Jawa Barat |
|  | 2 | meningkatnya layanan terbuka kearsipan | persentase layanan terbuka kearsipan | 80 | Program Pengembangan Kearsipan | jumlah pengunjung kearsipan untuk layanan terbuka |  | 6.000 org | 157.980.000 | 6.000 org | 197.320.000 | 6.000 org | 132.700.000 | 6.000 org | 867.000.000 | 5835 org |  |  |  | Bidang LOPK |
|  | 2 | meningkatnya layanan tertentu perpustakaan | persentase layanan tertentu perpustakaan | 81 | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | jumlah pengunjung perpustakaan untuk layanan tertentu |  | 294.000 org |  | 331.200 org |  | 691.200 org |  | 1.224.000 org |  | 1488000 org |  |  |  | Bidang LOPK |
|  |  | meningkatnya layanan tertentu kearsipan | persentase layanan tertentu kearsipan | 80 | Program Pengembangan Kearsipan | jumlah ketepatan waktu penemuan arsip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bidang LOPK |
|  | 3 | memenuhi layanan perpustakaan sesuai ISO | persentase audit layanan perpustakaan | 81 | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | jumlah audit internal layanan perpustakaan |  | 1 kali |  | 1 kali |  | 1 kali |  |  |  |  |  |  |  | Bidang LOPK | Bandung |
|  | 4 | memenuhi layanan kearsipan sesuai ISO | persentase layanan kearsipan | 80 | Program Pengembangan Kearsipan | jumlah audit internal layanan kearsipan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bidang LOPK |
| **Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mengembangkan kelembagaan dan SDM perpustakaan dan kearsipan** | 1 | meningkatkan pembinaan lembaga perpustakaan | persentase pembinaan lembaga perpustakaan | 81 | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | jumlah lembaga perpustakaan yang dibina |  |  |  | 1.825 unit |  | 590 unit |  |  |  |  |  |  |  | Bidang P3BB | Jawa Barat |
|  |  | meningkatkan pembinaan lembaga kearsipan | persentase pembinaan lembaga kearsipan | 80 | Program Pengembangan Kearsipan | jumlah lembaga kearsipan yang dibina |  |  |  | 27 LKD & 58 OPD |  | 27 LKD & 58 OPD |  | 27 LKD & 58 OPD |  | 27 LKD & 58 OPD |  |  |  | Bidang PK |
|  | 2 | memenuhi sertifkasi SDM perpustakaan | persentase pembinaan SDM perpustakaan | 81 | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | jumlah SDM perpustakaan yang dibina |  |  |  | 1966 org | 449.092.500 | 1.277 org | 990.000 |  |  |  |  |  |  | Bidang P3BB |
|  |  | memenuhi sertifikasi SDM kearsipan | persentase pembinaan SDM kearsipan | 80 | Program Pengembangan Kearsipan | jumlah SDM kearsipan yang dibina |  | 152 0rg |  | 152 0rg |  | 152 0rg |  | 152 0rg |  | 152 0rg |  |  |  | Bidang PK |
|  | 3 | meningkatnya kerjasama antar stakeholder perpustakaan | persentase naskah kerjasama perpustakaan | 81 | Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan | jumlah naskah kerjasama kegiatan PMK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bidang P3BB | Bandung |
| jumlah naskah kerjasama kegiatan KCKR |  | 25.558 eks |  | 4.946 eks |  | 4001 eks |  | 2.875 eks |  | 3.000 eks |  |  |  | Bidang DPBP |
|  | meningkatnya kerjasama antar stakeholder kearsipan | persentase naskah kerjasama kearsipan | 80 | Program Pengembangan Kearsipan | jumlah naskah kerjasama arsip dinamis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bidang PK | Bandung |
| jumlah naskah kerjasama arsip statis |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bidang Akulesta |

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA**

**OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

1. **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

* + - 1. Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuannya : Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

Sasarannya : Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK.

Indikator kinerja Bapusipda yang berkaitan dengan misi 1 yaitu :

1. Jumlah judul/eksemplar bahan perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat;
2. Literatur tentang Jawa Barat dan yang diterbitkan di Jawa Barat;
3. Jumlah naskah kuno yang dilestariskan di Jawa Barat;
4. Jumlah para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam di perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat;
5. Jumlah pengunjung (pemustaka) yang memanfaatkan perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat;
6. Jumlah lembaga perpustakaan yang dibina
7. Jumlah SDM perpustakaan yang dibina;
8. Jumlah pembinaan minat baca masyarakat;
9. Jumlah promosi perpustakaan.
10. Misi 3 : Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik.

Tujuannya : Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

Sasarannya : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK.

Indikator kinerja Bapusipda yang berkaitan dengan misi 3 yaitu :

1. Persentase OPD yang telah memenuhi standak baku kearsipan;
2. Jumlah pembinaan kearsipan;
3. Jumlah arsip yang diselamatkan dan dimanfaatkan;
4. Jumlah arsip yang di digitalisasi/alih media;
5. Persentase data center arsip.

**BAB VII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 yang telah disusun melalui suatu alur atau proses yang baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melalui pemikiran dan diskusi yang mendalam tentang rumusan perencanaan yang strategis bagi kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama kurun waktu lima tahun kedepan, seharusnya dapat dijadikan tolok ukur atau acuan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output), hasil (outcome),* dampak *(impact)* dan manfaat *(benefit)* yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 diharapkan dapat dilaksanakan atau terwujud sebagaimana mestinya dan konkritnya dapat menggambarkan penampilan perencanaan (*performance planning*) yang mudah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) maupun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat tergantung pada keterlibatan, peran serta dan upaya sungguh sungguh dari segenap unsur di lingkungan Bapusipda Provinsi Jawa Barat serta segenap *stakeholder* dibidang perpustakaan dan kearsipan, hingga akhirnya visi Bapusipda Provinsi Jawa Barat yaitu “**Perpustakaan Mencerdaskan Masyarakat dan Kearsipan Pilar Akuntabilitas**” dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | KEPALA BADAN  PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,  **Dr. Hj. NENNY KENCANAWATI, M.Si**  Pembina Utama Madya  NIP. 19570114 198503 2 002 |